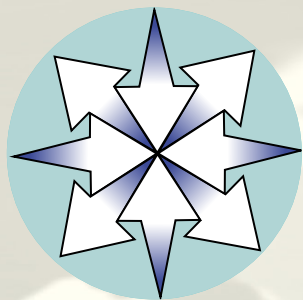


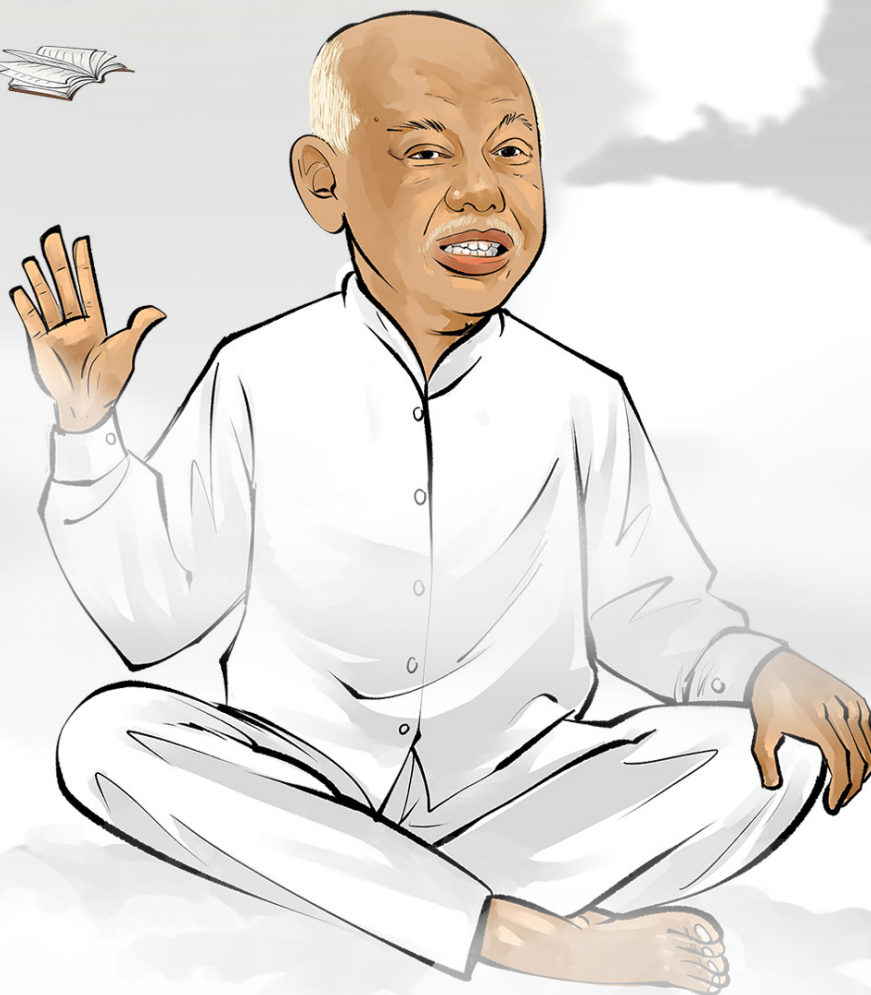
VOL. 33 SEPTEMBER 2022



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



**Selamat Jalan,  
Prof Azra**



**LAPORAN UTAMA**

**04 Sebuah Kehilangan Besar**



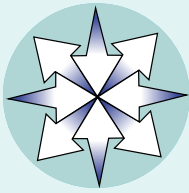
**03 KABAR KEBON SIRIH**

**18 LINTAS BERITA**

**14 OPINI**

**23 GALERI**

**17 GRAFIK**



DEWANPERS

**Susunan Redaksi Buletin Etika:****Dewan Pengarah****Ketua:**

Prof. Azyumardi Azra

**Wakil Ketua:**

M Agung Dharmajaya

**Anggota Dewan Pers:**

Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, Paulus Tri Agung Kristanto

**Sekretaris Dewan Pers:**

Syaefudin

**Penanggung Jawab/  
Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Atmaji Sapto Anggoro

**Redaktur Pelaksana:**

Arif Supriyono

**Sekretaris Redaksi:**

Firdha Yuni Gustia

**Redaksi:**

Abdul Salam Fadli, Reynaldo Adair, Imam Suwandi

**Sekretariat Dewan Pers:**

Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Elly Savitri Damayanthi, Watini

**Desain:** Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih No.32-34,  
Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 10110  
Telp: 021-3521488, 021-3504877,  
021-3504874, 021-3504875**Media Sosial:****Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.idBuletin Etika dalam format PDF  
dapat diunduh dari website  
secara gratis

# Mengenang Prof Azra

Pembaca, berita itu sungguh mengejutkan. Ketua Dewan Pers 2022 - 2025, Prof Azyumardi Azra, wafat di Selangor, Malaysia, Ahad (18/9/2022). Tepat empat bulan setelah beliau mulai memimpin kami sejak 18 Mei 2022. Beliau sejatinya berangkat ke Selangor untuk mengisi sebuah sesi konferensi internasional, memenuhi undangan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang juga dihadiri mantan Perdana Menteri Malaysia, Dato Anwar Ibrahim.

Guna mengenang kepergiannya, ETIKA edisi September 2022 mengulas riwayat almarhum dan kiprahnya selama menjabat ketua Dewan Pers dalam rubrik Laporan Utama. Kendati sangat singkat, beliau telah menanamkan fondasi cukup kuat pada kami, anggota Dewan Pers. Antara lain visinya mengenai kemerdekaan pers yang harus terus diperjuangkan di tengah masih banyaknya cobaan terhadap pers dan karya jurnalistik.

Prof Azra juga memiliki pandangan kuat untuk mendorong agar produk-produk di media sosial yang bernilai jurnalisme bisa mendapat perlindungan Dewan Pers. Demikian pula halnya dengan lembaga pers mahasiswa.

Pada edisi ini pula pembaca, kami hadirkan sejumlah artikel khas ETIKA, sebagaimana biasanya. Sebutlah pada rubrik OPINI. Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, menuliskan pemikirannya berjudul "Daya Kritis".

Adapun di rubrik Teropong, kami punya artikel terkait pengaduan, dengan topik "Bila Pengadu Menolak Draf Risalah". Sebuah proses pengaduan memiliki keluaran beragam. Salah satunya adalah risalah, yang merupakan ringkasan hasil dari proses mediasi yang dilakukan Dewan Pers terhadap pengadu dan teradu.

Di luar kedua rubrik tersebut, sejumlah artikel menarik lain sangat layak untuk Anda simak. Termasuk infografis peristiwa yang terjadi di Dewan Pers sepanjang bulan berjalan.

Oh ya, pembaca, bulan September sejatinya istimewa bagi kita semua di ekosistem pers nasional. Pada bulan inilah, tanggal 23 September 1999 lalu, Presiden BJ Habibie meneken beleid UU No 40/1999 tentang Pers. Boleh dikatakan juga, September adalah "bulan pers", kendati Hari Pers Nasional selalu kita peringati setiap bulan Februari.

Demikianlah pembaca Kabar dari Kebon Sirih kali ini. Selamat menyimak ETIKA edisi September dalam semangat untuk senantiasa berpikir merdeka. Salam kemerdekaan pers! ●

*Asmono Wikan*

Anggota Dewan Pers

# Sebuah Kehilangan Besar

**R**eputasi keilmuannya telah diakui banyak kalangan. Tak hanya sebatas di dalam negeri, publik internasional pun mengenalnya sebagai pemikir di bidang keislaman, sejarah, sosial, dan juga politik.

Menjadi pemateri di panggung seminar internasional kerap kali ia jalani. Selain mengabdikan ilmu di almaternya--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah--Prof Azyumardi Azra juga sempat berbagi ilmu sebagai pengajar di St Anthony College, Inggris, University of Philippines, dan Universiti Malaya.

Ia juga menjadi guru besar tamu di New York University (NYU), juga mengajar di Harvard University (di Asia Center), serta pada Columbia University. Selain itu, Prof Azra juga pernah menjadi

penguji di Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, maupun di University of Leiden, Belanda. Ilmu dan aneka tulisannya telah tersebar di pelbagai belahan dunia. Tak mengherankan bila gagasan Islam moderat yang ia usung mendapat penghargaan dari pemerintah Inggris dan Jepang.

“Bakti almarhum pada negara amat banyak. Kami merasa sangat kehilangan. Ia ilmuwan dan ulama yang berbakti sepenuh hati untuk negeri. Tidak banyak orang seperti dia,” kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selama 10 tahun, Prof Azra ikut membantu Kalla (ketika dua kali menjadi wapres) sebagai deputi bidang kesra di Sekretariat Wakil Presiden. Kalla mengakui, banyak masukan dan analisis yang diberikan Prof Azra dalam bidang kemasyarakatan, sosial, dan keagamaan.





Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra. (FOTO: DEWAN PERS)

Pandangan senada dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Pemikiran Prof Azra pada bidang ilmu sosial, kebudayaan, serta keilmuan keislaman dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Muhadjir tahu banyak tentang Prof Azra lantaran sama-sama beraktivitas di Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Hal itu membuat mereka sering bertemu dan berkomunikasi.



*Prof Azra tak pernah tergoda jabatan politik apa pun. Layaknya seorang sufi, ia tidak silau dengan materi.*

Tak hanya itu, Prof Azra juga menjadi anggota Selection Committee of Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP) yang diorganisasi oleh Toyota Foundation dan Japan Center, Tokyo, Jepang. “Kita sangat kehilangan atas kepergian beliau karena khazanah intelektual yang telah dia bangun sangat bermakna,” ujar Muhadjir yang menjadi inspektur upacara saat pemakaman Prof Azra di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (20/9).

Muhadjir mengaku punya hubungan baik dengan Prof Azra dan sering bersinergi. Satu hal yang



Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025, Azyumardi Azra (Kiri), Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Mohammad NUH (kanan) dalam acara Serah Terima Jabatan anggota Dewan Pers pada Rabu (18-06-2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

diingatnya ketika Azyumardi menjabat sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah. Kala itu, Muhadjir menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

“Kita saling cocok-cocokan. Kami berkomunikasi untuk mencari cara dan strategi membangun sebuah perguruan tinggi yang unggul dan hebat. Saat itu saya ketetulan lebih dulu menjadi rektor daripada beliau,” ujar Muhadjir.

### Orang yang Sudah Selesai

Pujian atas kiprah Prof Azra yang juga ketua Dewan Pers itu diutarakan oleh mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin.

Menurut Lukman, Prof Azra merupakan sosok cendekiawan sejati dan akademisi tulen. Mantan rektor UIN itu layak menjadi teladan.

“Ia tak pernah tergoda jabatan politik apa pun. Layaknya seorang sufi, ia tidak silau dengan materi, padahal kesempatan untuk mendapatkan hal itu sangat banyak. Orientasinya lebih keluar untuk kepentingan orang banyak,” kata Lukman.

Di mata Lukman, Prof Azra dinilai sebagai sosok yang tak memikirkan dirinya sendiri. “Itu pertanda orang yang sudah selesai dengan dirinya dan yang dipikirkan hanya bangsa serta masyarakat luas. Pandangan-pandangan keagama-

annya sangat menyejukkan. Ia merupakan pengawal moderasi Islam,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, menilai Prof Azra sebagai tokoh intelektual muslim paripurna yang memiliki reputasi mendunia. Pemikirannya melewati batas dan sekat budaya, agama, dan negara sehingga bisa diterima semua kalangan.

Zainut mengaku bersyukur pernah menjadi mahasiswa kala Prof Azra menjabat sebagai direktur Pascasarjana UIN. “Orangnya sangat disiplin, tegas, dan kritis. Ia punya kemampuan menganalisis masalah sangat tajam, sehingga bagi yang tidak memiliki argumentasi



kuat pasti kelabakan menjawab semua pertanyaannya,” papar Zainut.

Selain kedalaman ilmu, kata Zainut, almarhum juga memiliki perspektif yang sangat luas dalam melihat berbagai masalah. Pemikirannya sangat inklusif, moderat, seimbang, dan selalu berpijak pada nilai-nilai kebenaran serta keadilan.

Ada hal lain yang menarik perhatian wakil menteri agama terhadap Prof Azra. “Meskipun beliau sebagai tokoh Muhammadiyah tetapi sangat gigih membela Nahdlatul Ulama (NU) ketika diserang tentang gagasan mengampanyekan Islam Nusantara,” urainya. Menurut Zainut, dalam benak Prof Azra, Islam di Indonesia itu khas yang memiliki karakter istimewa. Islam di Indonesia dianggap ideal lantaran sudah teruji oleh sejarah.

Prof Azra, lanjut Zainut, secara elegan menawarkan pemikiran baru tentang Islam Nusantara yang berkemajuan. Ini merupakan perkawinan gagasan antara konsep Islam Nusantara yang diusung oleh NU dan Islam Berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Bagi Zainut, pemikiran itu menjadi model untuk membangun peradaban Islam di dunia global.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengemukakan Prof Azra semasa hidupnya telah menyentuh banyak orang lewat karya-karyanya atau tulisan-tulisannya. Kampus UIN digambarkan menjadi salah satu bukti pengabdian nyata almar-

hum kepada kemajuan ilmu serta pengembangan umat pada bangsa dan negara.

Anies pun mengenang kebersamaannya dengan Prof Azra. “Ia sebagai sosok yang sederhana tapi memiliki banyak ilmu. Pergi ke mana-mana bawa tas kecil. Bawaannya sedikit tapi ilmu paling banyak, diskusi paling banyak. Ia pribadi sederhana tapi memiliki pemikiran yang luas,” ungkap Anies.



*Seorang jurnalis akan bisa berkarya lebih optimal jika kesejahteraannya terjamin.*

Menurut Anies, Prof Azra juga konsisten memperjuangkan pentingnya demokrasi. Pikiran-pikirannya, termasuk saat menjadi ketua Dewan Pers, dinilai Anies sebagai pilar dalam menjaga demokrasi. Tulisan-tulisan Prof Azra juga memiliki bobot tersendiri.

Pernyataan Anies senada dikemukakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Kami merasa sangat kehilangan. Selain juga sebagai tokoh pers Indonesia, tulisan-tu-

lisannya selalu berkelas dunia. Ide-ide besarnya sangat menyedukkan,” ujar AHY.

Rasa kehilangan atas berpulangnya Prof Azra juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar NU, Yahya Cholil Staqf. Ia menilai Prof Azra memiliki girah kebersamaan dalam konteks kebangsaan atau kultur kesantunan NU dan Muhammadiyah.

Ada peninggalan Prof Azra yang dianggap amat bermanfaat bagi NU, yakni tesisnya saat menyelesaikan program doktor. Menurut Staqf, disertasi almarhum tentang jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 adalah salah satu rujukan penting bagi wacana Islam di Nusantara.

### **Kiprah di Dewan Pers**

Prof Azra merupakan ketua Dewan Pers tersingkat sepanjang lembaga ini terbentuk (berdasarkan UU Pokok Pers nomor 11/1966) pada 1966. Hanya empat bulan Prof Azra memegang tongkat komando Dewan Pers dari pejabat sebelumnya, Prof Mohammad Nuh. Pada 18 Mei Prof Nuh menyerahkan kepemimpinan pada Prof Azra dan tepat 18 September pula Prof Azra wafat di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia.

Selama memegang amanah sebagai ketua Dewan Pers, Prof Azra cepat menyesuaikan dengan irama kerja dan problematika kehidupan pers nasional. Sangat boleh jadi, pengalamannya pernah menjadi wartawan di Majalah Panji Masyarakat pada 1978-1986

ikut menunjang tugasnya dalam memegang kendali Dewan Pers.

Dengan segera ia mengidentifikasi problematika utama yang melingkupi kehidupan pers nasional lalu membuka jalan atau arah yang perlu ditempuh oleh semua unsur pers. Seruan pertama yang ia gaungkan adalah mengajak Dewan Pers dan semua insan pers untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Dalihnya adalah kenyataan arsitektur politik nasional yang sangat tidak ideal dan bahkan mendekati anomali.

Koalisi besar yang digalang pemerintah, tuturnya, seolah menafikan peran lembaga legislatif yang memiliki tugas utama menjalankan mekanisme kontrol. Dengan 80 persen anggota legislatif bersatu padu untuk senantiasa mendukung kebijakan pemerintah, maka fungsi kontrol tentu akan jauh melemah. Dalam kondisi inilah pers perlu mengambil peran untuk lebih nyaring menyuarakan pandangan kritis ke pemerintah.

“Bukan berarti kita selalu berhadapan dengan pemerintah. Jika ada program atau kebijakan pemerintah yang baik, kita harus mendukung. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah tidak tepat, kita harus memberikan masukan atau kritik. Pers harus mampu memberi pencerahan pada masyarakat,” paparnya.

Hal kedua yang menjadi sorotannya adalah tentang kemerdekaan pers. Prof Azra merasa jengah dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi me-

ngancam kemerdekaan pers. Padahal, sesuai pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers antara lain berfungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Dewan Pers mengidentifikasi ada 14 pasal (dalam 9 kluster) RKUHP yang bisa mengancam kemerdekaan pers karena terbukanya pihak lain untuk mendanai jurnalis lantaran pem-



### *Pers harus mampu memberi pencerahan pada masyarakat*

beritaan di media. Dewan Pers lalu melakukan reformulasi atas 14 pasal tersebut. Butir-butir masukan atau daftar inventarisasi masalah (DIM) ini diserahkan ke beberapa fraksi di Komisi III DPR. Selanjutnya, Komisi III DPR lalu mengundang Dewan Pers untuk melakukan rapat dengar pendapat umum dengan membahas reformulasi RKUHP dari Dewan Pers.

Komisi III DPR pun memuji reformulasi Dewan Pers. “Membaca reformulasi yang disampaikan Dewan Pers, kami merasa tercerah-

kan. Terasa ada relaksasi. Ini jelas dan menyejukkan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon J Mahesa, dari Fraksi Gerindra.

Sedangkan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi III DPR mengaku terkesan dengan reformulasi ini. “Dewan Pers mampu mengambil jalan tengah antara RKUHP dan kepentingan masyarakat pers. Ini sumbangsih pemikiran yang luar biasa. Ini yang perlu diwarisi dari beliau. Sikap *wasathiyah* (jalan tengah) itu ciri pemikiran beliau. Jadi, tidak ekstrem di kiri atau ekstrem di kanan,” urai Arsul.

Prof Azra juga meletakkan kualitas jurnalis pada porsi ketiga dari pemikirannya. Dia berharap, dengan ekosistem kemerdekaan pers yang terjaga, maka kualitas dan kuantitas karya jurnalistik bermutu mestinya akan kian meningkat. Upaya peningkatan kualitas jurnalis juga menjadi perhatian utamanya.

Uji kompetensi wartawan (UKW), mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Pedoman Pemberitaan Media Siber, maupun sertifikasi perusahaan pers merupakan langkah untuk menjaga kualitas jurnalistik. Itu sebabnya, dia berpesan agar Dewan Pers konsisten menjalankan program tersebut sesuai koridor.

Dia juga senantiasa menyerukan setiap instansi untuk tidak melayani media abal-abal. Sajian media abal-abal dianggapnya tak sesuai dengan upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebaliknya, dia meminta





**A** Ketua Dewan Pers periode 2022-2023, Azyumardi Azra (kanan) bersama Menko Polhukam, Mahfud MD dalam pertemuan membahas RKHUP di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers ikut melindungi pelbagai program siniar (*podcast*) yang merupakan produk dari perusahaan pers dan bukan karya individu. Dia mengaku sedih lantaran banyak program siniar berkualitas yang justru sering mendapat serangan dari netizen.

Hal keempat yang juga menjadi prioritas Prof Azra adalah tentang kesejahteraan insan pers. Tak bisa dipungkiri, di era sekarang masih banyak jurnalis dan insan pers lain yang gajinya masih berada di bawah upah minimum provinsi. Kondisi ini tentu membuat prihatin. Untuk itu, dia selalu mengingatkan dan mengimbau agar perusahaan pers mematuhi ketentuan pemerintah tentang pengupahan terhadap pekerjanya.

Di mata Prof Azra, tingkat kesejahteraan juga terkait erat dengan kualitas karya jurnalistik. Seorang jurnalis akan bisa berkarya lebih optimal jika kesejahteraannya terjamin. Sebaliknya, jika kesejahteraan insan pers masih jauh dari kondisi standar, maka hal itu akan berdampak pula pada penurunan etos kerja. Pada gilirannya, rendahnya etos kerja akan berpengaruh pada kualitas jurnalistik yang dihasilkan.

Problematika kelima yang ingin segera diwujudkan Prof Azra, sebagaimana diutarakan pengacara dan mantan anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, adalah pembentukan dewan atau lembaga pertimbangan Dewan Pers. Keberadaan lembaga ini diperlukan

untuk menangani masalah-masalah internal terkait dengan sikap dan perilaku anggota Dewan Pers. “Jika ada masalah dengan sikap anggota Dewan Pers, maka lembaga pertimbangan itulah yang akan lebih dulu menanganinya,” kata Prof Azra.

Lima pokok pikiran besar itu memang belum sempat terwujud. Akan tetapi hal itu tentu menjadi warisan atau peninggalan penting dari Prof Azra untuk Dewan Pers. Tugas semua anggota Dewan Pers untuk mempertimbangkan dengan seksama, perlu-tidaknya mewujudkan gagasan Prof Azra tersebut. ●

**Arif Supriyono, tenaga ahli Dewan Pers**

# Khazanah Ilmu Si Permata Hijau

Cita-citanya semula adalah menjadi guru. Itu sebabnya dia berkeinginan melanjutkan kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Namun ayahnya meminta agar dia berkuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Memenuhi amanah sang ayah, usai menyelesaikan sekolah di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Padang, pria bernama Azyumardi Azra itu pun lalu masuk di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Di kampus inilah kadar intelektualitasnya kian terasah.

Lelaki kelahiran 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatra Barat, itu terlibat di organisasi mahasiswa dan pernah duduk sebagai ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN dan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat tahun 1981-1982. Ia juga aktif di Forum Diskusi Mahasiswa Ciputat (Formaci). Tak hanya itu, ia pun pernah bersama teman-temannya melakukan aksi protes terhadap pemerintahan Soeharto saat sidang umum MPR tahun 1978 digelar.

Ia terus mengasah khazanah kelimuannya di pelbagai lembaga. Anak ketiga dari lima bersaudara itu lalu bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES). Dorongan dari seniorinya di kampus, Fachry Ali, yang membuat Azra bergabung di LP3ES. Sempat mampir di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Azra kemudian memilih keluar dan kembali ke IAIN untuk meneruskan pengembaraan keilmuannya.

Fachry yang sudah lebih dulu dikenal khalayak bahkan sengaja membuat tulisan opini di media cetak dengan mencantumkan nama Azyumardi Azra sebagai penulis bersama dia. "Saya melihat Azra punya kapasitas intelektual yang bagus. Dengan mencantumkan nama dia di tulisan yang saya buat, saya berharap kelak Azra akan semakin dikenal orang. Ternyata kemudian itu terbukti," kata Fachry.

Lahir dari rahim ibu bernama Ramlah dan ayah Azikur, derajat keilmuan Azra terus meningkat. Setelah lulus dari UIN Ciputat, pada 1986 ia memperoleh beasiswa Fullbright Scholarship untuk melanjutkan studi ke Columbia University, Amerika Serikat. Gelar MA (*master of art*) dari Depart-



 Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Azyumardi Azra (tengah) dalam cara literasi media pada Jumat (12-9-2022) di Padang, Sumatera Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

temen Bahasa dan Budaya Timur Tengah pada tahun 1998 ia raih. Di tahun itu pula ia mendapatkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama. Namun kali ini Azra pindah ke Departemen Sejarah dan menggaet gelar MA lagi di tahun 1989 serta *master of philosophy* (MPhil) di tahun 1990.

Selanjutnya jenjang pendidikan tertinggi berupa gelar doktor *philosophy of degree* (PhD) di tahun 1992 ia dapatkan dari Universitas Oxford, Inggris, dengan disertasi berjudul “The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian ‘Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”. Disertasi ini kemudian



*Pemikiran dan gagasannya tentang nilai-nilai keislaman, sejarah, sosial, dan politik mengundang perhatian banyak pihak.*

juga dipublikasikan oleh Australian Association of Asian Studies bekerja sama dengan Allen Unwin.

Pada 2009, Azra dikukuhkan sebagai guru besar di IAIN Ciputat. Tak lama berselang, ia lalu terpilih sebagai rektor di kampus tersebut. Aktivitas Azra di rektorat bermula tatkala Quraish Shihab yang menjadi rektor memintanya sebagai pembantu rektor.

Usai kepemimpinan Shihab, Prof Azra meneruskan sebagai rektor melalui pemilihan. Di masa kepemimpinannya pula IAIN berubah nama menjadi UIN dengan membuka beberapa fakultas yang tidak melulu terkait dengan bidang keagamaan, misalnya fakultas kedokteran, psikologi,





**A** Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Azyumardi Azra (tengah) dalam jumpa pers tentang RKHUP pada Kamis (7-7-2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

sains dan teknologi, ilmu kesehatan, ekonomi dan bisnis, serta ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada 1993, suami dari Ipah Far-  
iha ini juga mengelola jurnal  
Studia Islamika. Pemikiran dan  
gagasannya tentang nilai-nilai  
keislaman, sejarah, sosial, dan  
politik mengundang perhatian  
banyak pihak. Harian Republika  
menjadikan Prof Azra sebagai  
kolumnis tetap di rubrik Reso-  
nansi pada 2004-2005. Tulisan  
opini Prof Azra kemudian berte-  
baran di pelbagai media. Dia lalu  
ditetapkan oleh penerbit Mizan  
sebagai penulis paling produktif  
pada saat itu.

### Berbagai Anugerah

Prof Azra juga dikenal getol me-

ngembangkan wawasan keisla-  
man yang berjiwa keindonesiaan.  
Dasar landasannya adalah lan-  
taran keberadaan umat Islam  
yang memang hidup dan menjadi  
warga negara di Indonesia. “Kita  
akan mengembangkan keislaman  
yang kontekstual dengan Indo-  
nesia karena tantangan umat  
muslim di sini adalah tantangan  
Indonesia, bukan dari wilayah  
lain,” ujarnya.

Ia tak sepakat bila anak-anak  
hanya memahami agama secara  
hitam-putih. Prof Azra mengan-  
jurkan agar pendekatan yang  
digunakan dalam memahami  
agama tidaklah bersifat fanatis.  
Bahkan pendekatan atas dasar  
mazhab pun cenderung ia per-  
lunak pemahamannya sehingga

sikap anak-anak tidak menelan  
bulat-bulat pemikiran yang ada.

Di balik keluasan ilmunya, pria  
yang jarang tertawa itu pem-  
bawaannya amat bersahaja. Ke  
mana-mana hanya diantar oleh  
sopir tanpa ajudan. Pernah pula  
saat akan ke Gedung DPR, ia  
pun melewati pintu pemeriksaan  
dan dipaksa meninggalkan kartu  
identitas sebagaimana layaknya  
pengunjung biasa.

Di setiap ada acara, ia acap me-  
minta orang lain untuk duduk  
atau makan semeja dengannya,  
meski orang itu bukan undangan  
(tamu) penting. “Makan di sini  
saja, Mas,” tutur Prof Azra.

Ketika hendak menghadiri pelun-  
curan Indeks Kemerdekaan Pers



(IKP) 2022 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, Prof Azra datang satu jam sebelum acara dimulai. Sama sekali belum ada tamu atau undangan yang hadir. Ia datang seorang diri dengan mementeng tas berisi laptop. “Saya diminta memberi sambutan secara daring di acara forum dialog yang diadakan Dewan Pers Timor Leste. Kalau di rumah, sambungan internet kadang lemot. Kalau di hotel kan lebih aman sambungan internetnya,” ungkapnya.

Ya, ide dan gagasannya telah menyebar ke beberapa negara. Ia termasuk salah satu pemikir Islam ternama di kawasan Asia Tenggara. Nama pemberian orang tua Azyumardi Azra yang bermakna mutiara hijau itu rupanya benar-benar berkilau.

Banyak pihak yang menyambut positif gagasan Prof Azra. Ratu Elizabeth II dari Inggris pun menganugerahkan penghargaan the Commander of the British Empire pada 2010. Dengan anugerah ini, Prof Azra berhak menyandang gelar ‘sir’. Dia bahkan menjadi satu-satunya orang Indonesia dan warga negara nonpersemakmuran (persemakmuran adalah negara-negara yang pernah dijajah Inggris) yang mendapat anugerah itu.

Pemikiran dan pencerahan Prof Azra juga menyedot perhatian negara Jepang. Kaisar Akihito lalu memberikan anugerah the Order of the Rising Sun: Gold and Silver pada Prof Azra. Anugerah ini diberikan pada tahun 2017.

Jauh sebelum itu, Prof Azra juga mendapat piagam tanda kehorm-

matan Bintang Mahaputra Utama di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005. Dengan anugerah ini, Prof Azra berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Prof Azra memang layak orang yang haus ilmu. Tak kurang dari 17 buku karyanya telah diterbitkan. Ia juga memiliki koleksi lebih dari 15.000 buku. Sedangkan



*Dia menjadi satu-satunya orang Indonesia dan warga negara non persemakmuran yang berhak menyandang gelar ‘sir’.*

jumlah artikel di media dan majalah yang ia tulis telah melewati angka 900. Sebuah pencapaian yang tentu masuk kategori sangat produktif.

Tatkala mengambil S3 di Inggris, Prof Azra juga mengajar sebagai dosen pada St Anthony College. Dia pernah pula menjadi profesor tamu pada University of Philippines, Philipina dan University

Malaya, Malaysia, pada tahun 1997. Prof Azra juga anggota dari Selection Committee of South-east Asian Regional Exchange Program (SEASREP) yang diorganisasi oleh Toyota Foundation dan Japan Center, Tokyo, Jepang antara tahun 1997-1999.

Tak hanya itu, pada 2001, dia menjadi profesor tamu internasional pada Departemen Studi Timur Tengah, New York University (NYU). Ia mengajar pula pada NYU, Harvard University (di Asia Center), serta pada Columbia University. Dia juga dipercaya menjadi pembimbing sekaligus penguji asing untuk beberapa disertasi di Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, maupun di University of Leiden.

Atas dasar nama besar dan buah pikirannya itu pula Prof Azra semula direncanakan menjadi pemateri dalam seminar di Malaysia atas undangan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang juga dihadiri oleh mantan wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim. Namun, Allah berkehendak lain.

Menjelang mendarat di Kuala Lumpur, Prof Azra yang baru empat bulan menjabat ketua Dewan Pers itu mengalami serangan jantung pada 16 September. Begitu mendarat, ia langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Dua hari kemudian, Prof Azra mengembuskan napas terakhir di rumah sakit negeri jiran itu. Selamat jalan, permata hijau. • **Arif Supriyono, tenaga ahli Dewan Pers.**

# Daya Kritis



Oleh **A Sapto Anggoro \***)

BANYAK pihak sering terjebak pada dua kutub dikotomis pemikiran baik dan buruk. Baik diidentikkan dengan *positive thinking* dan yang buruk diidentikkan dengan *negative thinking*. Berpikir positif, celakanya berarti disuruh percaya dan tidak boleh mendebat. Begitu pula sebaliknya, berpikir negatif itu dianggap orang yang selalu mencela, *arguing*, dan tidak mau percaya.

Dalam dunia jurnalistik, keduanya sebaiknya tidak menjadi pilihan. Pilihan jurnalis adalah bukan negatif dan positif pemikiran, akan tetapi daya kritis (*critical thinking*). Dalam melihat setiap persoalan, wartawan tidak harus langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Meski untuk menuangkannya tulisannya, sang wartawan harus menyampaikan apa yang diucapkan narasumber.

Karena wartawan tak langsung percaya begitu saja, maka dikembangkan daya kritis. Lalu dicarilah narasumber yang bisa mengkritisi atau bisa memberi pandangan berbeda dengan narasumber lainnya. Dengan demikian sebuah informasi akan menjadi dialogis, sekaligus mencerahkan pembaca kritis, untuk menilai logika mana dari beberapa narasumber tersebut yang lebih masuk akal.

Daya kritis memang banyak dimulai dari kecurigaan, ketidakpercayaan, melihat keanehan dan ketidaklogisan, tidak sesuai nalar, dan sebagainya. Namun, kalau itu dibiarkan tanpa melakukan penelitian, maka akan menjadi sekadar *negative thinking* yang juga tidak bagus. Sebaliknya apabila semua pertanyaan itu (*curious*) dikembangkan serta berusaha dicari jawabnya dengan analisis dan literasi atau fakta-fakta sebagai bukti pendukung, akan menghasilkan temuan-temuan dahsyat yang

mencerahkan, dan bisa menjawab banyak hal. Begitu pula mengenai terciptanya keilmuan, teori, dan sebuah produk untuk masyarakat.

Mengapa demikian? Berpikir kritis itu pada dasarnya adalah berpikir secara reflektif untuk memutuskan apakah hal itu perlu diyakini maupun dilakukan. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Robert H Ennis yang disebut bapak pemikiran kritis, menyampaikan "*critical thinking is reasonable reflective thinking that focused on deciding what to believe or do*" (Ennis, 1985: 54; 1996: 396).

Berpikir kritis, menurut Ennis, ada beberapa aspek: (1) Memberikan penjelasan sederhana, (2) Membangun keterampilan dasar, (3) Membuat kesimpulan, (4) Membuat penjelasan lebih lanjut, (5) Berstrategi dan bertaktik. Pemikir kritis akan peka terhadap informasi atau situasi yang sedang dihadapinya.

Ketika, misalnya, baru-baru ini seorang jenderal polisi yang jadi tersangka pembunuhan, menyampaikan ke publik agar masyarakat tidak berasumsi macam-macam terhadap kasus yang menimpa dirinya, sejatinya itu adalah "kejahatan" terhadap pemikiran kritis. Tidak boleh siapa pun untuk membatasi pemikiran kritis seseorang.

Bagi pihak yang biasa main di tataran pekerjaan struktural, kadang tidak biasa menghadapi pemikiran kritis. Di kepalanya yang ada hanyalah perintah, semua harus tunduk pada perintahnya. Masyarakat luas bukan anak buahnya, tak layak memerintahkan orang lain untuk tidak berasumsi. Pandangan itu hanya menghalangi orang untuk kritis. Jangan dianggap rakyat semua bodoh dan tak berpikir.

Padahal, kalau kita berpikir terbuka, justru biasanya dari orang-orang yang berpikiran kritis ini



## OPINI

bisa diambil kesimpulan yang bijak. Jangan-jangan masukannya merupakan revisi dan peringatan yang bisa menajamkan kesimpulan akseleratif.

Filsuf Socrates menetapkan fakta, bahwa seseorang tidak bisa tergantung pada mereka yang memiliki “otoritas” untuk menyuarakan wawasan dan pengetahuan yang mendalam. Ia mempertunjukkan, bahwa kebanyakan orang mungkin punya *power* dan posisi tinggi, sekalipun pemikirannya sangat kacau dan tidak logis. Ia menetapkan pentingnya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam, sebelum kita menerima gagasan-gagasan yang berguna ataupun pantas untuk diyakininya.

Banyak ilmu dan teori, yang dihasilkan dari berpikir kritis, teruji karena sudah melalui pertanyaan mendalam yang terjawab. Ketika kita tidak percaya pada sebuah laporan orang lain, maka kita melakukan dengan batu uji (metodologi) yang sesuai. Bisa jadi kesimpulannya benar, tapi bisa jadi salah. Ketika kesimpulan benar, bisa dijelaskan lebih komprehensif mengenai kenapa lahir teori/kesimpulan tersebut. Dengan demikian, akan menambah khazanah keilmuan dan memberikan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Lahirnya pesawat terbang, lahirnya alat komunikasi (telepon tetap maupun telepon genggam), mobil, mesin uap/kereta api, juga listrik, adalah dari sebuah pertanyaan kritis. Lalu hal itu ditindaklanjuti dengan pembuktian, analisis, percobaan, sehingga menghasilkan temuan-temuan yang memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat.

Begitu pula dengan teori-teori yang banyak dipakai di masyarakat, misalnya pitagoras, bejana berhubungan atau archimedes, ekonomi mikro-makro, sosiologis, politik, dengan berbagai variannya, adalah hasil dari pertanyaan besar, kritis, dan tidak mudah percaya sebelum melakukan penggalian data, mengujinya, menganalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini kadang melahirkan rekomendasi untuk eksekusi, tetapi kadang menghasilkan teori.

Banyak yang menyimpulkan, bahwa berpikir kritis identik dengan berpikir logis. Bisa saja demikian. Meski sebenarnya berpikir kritis adalah berpikir dengan menelaah suatu permasalahan dari berbagai faktor, umumnya diikuti dengan sikap pro-aktif. Sementara berpikir logis adalah berpikir dengan akal sehat dan apa yang dihasilkan dari pemikiran tersebut dapat diterima secara logika.

Berpikir kritis itu memiliki 4 karakteristik, yakni (1) bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan logis, (2) memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan, (3) menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar, (4) mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian (argumentatif).

Ada banyak hal yang bisa memengaruhi berpikir kritis, yakni antara lain kemalasan berpikir, takut menyampaikan pendapat, faktor lingkungan yang tidak mudah menerima masukan (*open mind*), juga faktor kultur (budaya) sekitar, juga soal keyakinan religi. Padahal, dengan adanya daya kritis, yang kemudian bisa memberikan alasan yang masuk akal, yang kesimpulannya bisa saja mendukung atau menolak terhadap kesimpulan awal, maka akan menguatkan nilai-nilai apa pun, baik nilai agama, nilai budaya, nilai lingkungan dan sebagainya.

Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari yang mendorong pemikiran-pemikiran kritis--bisa menjadikan hal ini sebuah budaya intelektual--maka akan selalu membuka cakrawala dan menerima perbedaan pendapat dan siap beradu pendapat (*open mind*), agar menghasilkan kesimpulan yang kokoh (*robust*) dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mudah memang, tapi dengan cara-cara seperti tersebut di atas, maka diskursus publik saat ini, akan semakin sehat. Bukan diskursus yang lemah nalar, penuh emosi dan amarah, sensitif pada perbedaan, yang ujungnya mudah mengadakan ke polisi. Itu diskusi yang menyehatkan, seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua Dewan Pers, Moh pada Nuh, dalam acara serah terima pengurus Dewan Pers 18 Mei 2022.

Kita tentu ingat, pernah ada sebuah hasil riset yang menyatakan, bahwa pada tahun tertentu akan ada gempa bumi dahsyat di patahan Selatan Jawa (*megathrust*). Hasil riset itu disampaikan ke publik, lalu sekelompok orang mengadakan periset ke kepolisian. Ini absurd. Mestinya bukan diadakan ke polisi, tapi diuji balik keabsahan hasil penelitian. Begitulah ilmu pengetahuan bekerja dan di situlah daya kritis mencari kebenaran hakiki. ●

\*) anggota Dewan Pers



# Anugerah Dewan Pers 2022

Apresiasi bagi insan pers Indonesia

## Kriteria Umum:

1. Media, wartawan, lembaga dan perorangan yang berkontribusi dalam penegakan kemerdekaan pers.
2. Media dan wartawan yang memperkokoh pelaksanaan UU Pers No 40 tahun 1999 dan mengikuti peraturan Dewan Pers termasuk Kode Etik Jurnalistik.
3. Media dan wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial untuk kepentingan umum.
4. Media yang memiliki tata kelola yang baik sesuai Standar Perusahaan Pers.
5. Lembaga dan perorangan non pers yang memberikan kepeloporan terhadap pers Indonesia.
6. Karya yang dikompetisikan sesuai dengan tema yang diangkat pada kurun produksi 5 tahun terakhir hingga tanggal 31 Oktober 2022.
7. Karya Jurnalistik yang diikutsertakan dalam kompetisi, belum pernah diikutkan dalam kompetisi lainnya.
8. Khusus menyangkut karya foto, penilaian mengacu pada kriteria World Press Photo. Dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Visual quality.
  - b. Story.
  - c. Representation.

## Kriteria Khusus:

1. **Wartawan/jurnalis**
  - a. Telah dinyatakan lulus dan/atau memiliki sertifikasi wartawan; atau
  - b. Bekerja di media yang telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers.
2. **Media**
  - ◆ Terverifikasi faktual di Dewan Pers
3. **Masyarakat (Kampus, Lembaga Media Watch, Lembaga Pegiat Kemerdekaan Pers, dan Lembaga Advokasi Pers)**
  - a. Secara konsisten dan terus menerus dalam waktu tertentu memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan pers di lingkungan aktivitasnya; dan
  - b. Diusulkan oleh konstituen Dewan Pers atau masyarakat.
4. **Perorangan**
  - a. Secara konsisten dan terus menerus dalam waktu tertentu memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan pers di lingkungan aktivitasnya; dan
  - b. Diusulkan oleh konstituen Dewan Pers atau masyarakat.

## Kategori Anugerah Dewan Pers

1. **Wartawan/jurnalis**
  - a. Kategori wartawan cetak,
  - b. Kategori wartawan radio,
  - c. Kategori wartawan televisi,
  - d. Kategori wartawan siber, dan
  - e. Kategori wartawan foto.
2. **Media dengan sub kategori:**
  - a. Jumlah karyawan di bawah 50 orang,
  - b. Jumlah karyawan antara 51-100 orang,
  - c. Jumlah karyawan di atas 100 orang.
3. **Masyarakat (Kampus, Lembaga Media Watch, Lembaga Pegiat Kemerdekaan Pers, dan Lembaga Advokasi Pers)**
4. **Perorangan**, pejuang kemerdekaan pers (baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup).
5. **Pemerintah.**

## Tema:

## Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa

Tema Anugerah Dewan Pers tahun ini menggambarkan bagaimana karya-karya jurnalistik yang telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik, bernilai berita, dan senantiasa berpihak kepada kebenaran, mampu menuntun publik pada nilai-nilai keadaban bangsa. Baik dalam hal perbaikan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, pembentukan kohesi sosial, maupun amplifikasi keluhuran nilai budaya. Peserta bebas memberikan makna dalam setiap karya jurnalistik yang dikirimkan, selama masih dalam lingkup penjelasan tema di atas.

**KIRIMKAN KARYAMU!**



## Mekanisme Pengumpulan Karya

- ◆ Peserta dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Anugerah Dewan Pers dengan domain [anugerah.dewanpers.or.id](http://anugerah.dewanpers.or.id)
- ◆ Peserta boleh mengirimkan maksimal 3 karya.
- ◆ Pendaftaran dan pengumpulan karya dimulai dari tanggal **12 September 2022** hingga **31 Oktober 2022**.
- ◆ Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi call center **0813 3362 8987** atau email panitia [anugerah@dewanpers.or.id](mailto:anugerah@dewanpers.or.id)





▲ Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana (tengah) berfoto bersama usai melaksanakan mediasi dalam acara penyelesaian pengaduan antara Sdr. Bambang Widjojanto (HT Partners) terhadap media siber, poskota.co.id pada Kamis(15-09-2022) di Depok, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

## Laporan Kasus Pengaduan Agustus 2022

**Risalah No 55**  
Mohd Fernando Arrasyi dengan mediaapakabar.com

**Risalah No 56**  
Haryadi dengan handalonline.com

**Risalah No 57**  
Ifanora dengan ranaiapos.com

**Risalah No 58**  
Ifanora dengan delapan6.com

**Risalah No 59**  
Ifanora dengan mataperistiwa.id

**Risalah No 60**  
Ifanora dengan cindai.id

**Risalah No 61**  
Bambang Widjojanto dengan poskota.co.id

**Risalah No 62**  
PT Adisurya Cipta Lestari dengan mjnews.id

**Risalah No 63**  
PT Adisurya Cipta Lestari dengan aktual.com

**Risalah No 64**  
PT Hoki Makmur Sejati dengan portalinvestigasi.co

**Risalah No 65**  
PT Hoki Makmur Sejati dengan porossatu.com

### SURAT



**17 Surat**  
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

**38 Surat**  
Surat Undangan Mediasi.

**39 Surat**  
Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

**47 Surat**  
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

**PPR: 26 PPR**

terhadap tvonenews.com atas pengaduan Albert Aries



### Dewan Pers Minta Aparat Usut Peretasan Akun Awak Redaksi Media

JAKARTA--Dewan Pers telah menerima laporan dari beberapa konstituen, bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi. Peretasan ini terjadi sejak 24 September 2022. Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.

Tindakan peretasan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers. Padahal menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, dan aparat

penegak hukum. Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum (pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers).

Hal ini menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana pasal 28 UUD 1945.

Berkaitan dengan kejadian tersebut, Dewan Pers mengeluarkan seruan (siaran pers) pada 27 September 2022 yang menegaskan bahwa: Pertama, mengancam semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya. Kedua,

meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas.

Ketiga, mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik. Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal 4 UU Pers) sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana (pasal 18 UU Pers).

▲ Tim redaksi Narasi berkunjung ke Dewan Pers untuk mengadakan peretasan yang mereka alami pada Senin (3/10/2022), di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

### Peserta UKW di Jakarta Heningkan Cipta untuk Prof Azra

JAKARTA--Dewan Pers memfasilitasi uji kompetensi wartawan (UKW) bekerja sama dengan tiga



▲ Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana (berdiri) membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan pada Jumat (23-09-2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



lembaga uji pada Jumat dan Sabtu, (23-24/9), di Hotel Aryaduta, Jakarta. Ketiga lembaga uji itu, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Radio Republik Indonesia (RRI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Ketika membuka acara, anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, terlebih dulu mengajak semua peserta untuk menghenyakan cipta mendoakan almarhum Prof Azyumardi Azra. Ketua Dewan Pers itu meninggal pada 18 September di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia, karena sakit.

Menurut Yadi, Prof Azra menghendaki adanya perbaikan taraf hidup wartawan. “Prof Azra senantiasa berharap agar wartawan Indonesia bisa hidup sejahtera,” tuturnya.

Melalui pelaksanaan UKW inilah, kata Yadi, insan pers bisa mewujudkan cita-cita mulia Prof Azra. Kegiatan UKW merupakan salah satu upaya Dewan Pers untuk selalu mendorong terwujudnya peningkatan profesionalisme wartawan. ●

### Muhadjir Effendy Pimpin Pemakaman Prof Azra di TMP Kalibata

JAKARTA--Pemakaman jenazah Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi



KEMENKO PMK, Muhadjir Effendy. (FOTO: DEWAN PERS)

Azra, dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Selasa (20/9/2022) pagi. Pemakaman secara militer itu dimulai menjelang pukul 09.00 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bertindak selaku inspektur upacara. “Atas nama negara bangsa dan Tentara Nasional Indonesia, saya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dengan ini mempersembahkan kepada persada Ibu Pertiwi jiwa dan raga almarhum,” kata Muhadjir.

Selain kerabat dan keluarga almarhum, beberapa tokoh dan pejabat negara juga terlihat menghadiri pemakaman mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut. Tampak mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla,

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, dan lain-lain. ●

### Innalillahi wa Innailaihi rajiun, Dewan Pers Berduka

SELANGOR--Duka mendalam dari keluarga besar Dewan Pers atas wafatnya Ketua Dewan Pers, Prof Dr Azyumardi Azra, pada Minggu (18/9) pukul 12.30 waktu Malaysia. Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah dua periode itu wafat di RS Serdang, Selangor, Malaysia, karena sakit.

Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, mengalami gangguan kesehatan di Malaysia pada saat hendak mendarat di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (16/9) sore. Ketua Dewan Pers saat itu sedang mengadakan kunjungan ke Malaysia untuk menjadi narasumber seminar internasional. Begitu mendarat di Bandara



Prosesi pemakaman Prof. Azyumardi Azra pada Selasa (20-09-2022) di TMP Kalibata, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Kuala Lumpur, Prof Azra langsung dibawa ke Rumah Sakit Serdang, Malaysia.

Prof Azra sempat menjalani perawatan intensif dan dalam pemantauan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Hingga akhirnya Prof Azra menutup mata di rumah sakit tersebut.

### Anugerah Dewan Pers 2022: Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa

JAKARTA -- Gunung mendorong peningkatan kualitas karya jurnalistik di Indonesia, Dewan Pers kembali menggelar Anugerah Dewan Pers 2022. Ajang apresiasi tahunan ini mengusung tema “Jurnalisme Berkualitas untuk

Peradaban Bangsa”.

Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, mengatakan bahwa karya jurnalistik yang berkualitas layak mendapat apresiasi. Dewan Pers mewujudkan apresiasi itu melalui Anugerah Dewan Pers 2022.

“Menjaga dan memperjuangkan kemerdekaan pers menjadi tugas bagi setiap institusi pers maupun insan pers. Kemerdekaan pers yang terjaga dengan baik akan lebih memungkinkan bagi lahirnya karya jurnalistik berkualitas yang akan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya di Gedung Dewan Pers, Selasa (13/9). ●

✓ Poster Anugerah Dewan Pers 2022 dengan tema “Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa” (FOTO: DEWAN PERS)



### Ketua Dewan Pers: Jangan Layani Media yang Tindakannya Tidak Terpuji

TANAH DATAR--Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, mengingatkan agar dalam bekerja media menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia juga berpesan supaya pers bertanggung jawab

tidak terpuji. Ia mengimbau media seperti itu tak dilayani. “Mereka tidak menggunakan KEJ sebagai rujukan. Mereka sering menakut-nakuti. Ini bahaya dan jangan layani mereka,” ujarnya.

Dia pun mengajak masyarakat untuk membantu pers supaya bisa lebih baik lagi. Menurut dia, selanjutnya masyarakat menerima media



▲ Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Azyumardi Azra (batik) dalam acara literasi media pada Jumat (12-9-2022) di Padang, Sumatera Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

serta bekerja dengan mengedepankan integritas.

Pandangan itu ia kemukakan dalam literasi media dan seminar sehari tentang “Membedakan Media Profesional dengan Media Abal-Abal di Tanah Datar”. Acara yang digelar di Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Senin (12/9) itu dihadiri sekitar 300 peserta.

Prof Azra menuturkan, media abal-abal sering melakukan tindakan

yang sudah tersertifikasi, berbadan hukum, dan berintegritas. ●

### Prof Azra: Demokrasi Alami Kemunduran

JAKARTA--Kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan secara bertahap. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilangnya kualitas demokrasi sehingga bisa mengarah pada rezim otoriter.





Pandangan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, Kamis (8/9) di Jakarta. Prof Azra memberikan kuliah umum pada proses wisuda di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember.

“Saat ini banyak kalangan berpendapat, penegakan hukum tidak mencerminkan keadilan. Ini mengakibatkan demokrasi mengalami kemunduran,” tuturnya.

Hal lain yang menyebabkan mundurnya demokrasi, kata dia, adalah makin lemahnya institusi politik yang menjadi penopang sistem demokrasi. Ia menggambarkan penurunan kualitas demokrasi itu bisa dilihat dari hajatan pemilu yang tidak kompetitif, pembatasan partisipasi, lemahnya akuntabilitas

^ Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra saat memberikan kuliah umum di STHI Jember pada Kamis (8-9-2022) di Jakarta. (SUMBER FOTO: JENTERA.AC.ID)

v Jumpa Pers usai tim pengacara istri Ferdy Sambo melakukan konsultasi kepada Dewan Pers pada Jumat (15/7) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

pejabat publik, penegakan hukum yang tidak adil, dan sebagainya. •

### Klarifikasi Dewan Pers tentang Tuduhan Menerima Gratifikasi

JAKARTA--Seorang yang mengaku bernama Teuku Yudhistira pada Senin, 5 September 2022, telah melaporkan Dewan Pers ke Badan Reserse Kriminal (Bare-

skrim) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Mereka menuduh adanya aliran dana atau gratifikasi dari tim Ferdy Sambo (mantan Kadiv Propam Polri) kepada oknum Dewan Pers pada 15 Juli 2022.

Mencermati informasi tentang tuduhan itu, Dewan Pers melalui Siaran Pers yang dipublikasikan pada 7 September 2022 memberikan penjelasan. Laporan yang dilakukan Sdr Teuku Yudhistira tidak memiliki dasar yang kuat karena tanpa fakta dan hanya berdasarkan asumsi.

Dewan Pers menerima Sdr Arman Hanis dkk sebagai pengacara keluarga Ferdy Sambo pada 15 Juli 2022 di Gedung Dewan Pers lantai 7 dalam rangka konsultasi terkait pemberitaan dan tidak ada gratifikasi dalam bentuk apa pun. Banyak jurnalis yang hadir dan meliput acara itu. •

### Pascaputusan MK, Dewan Pers-Konstituen Konsolidasi Hadapi UKW Palsu

JAKARTA--Dewan Pers bersama anggota konstituen akan melakukan konsolidasi dalam menghadapi banyaknya gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang





▲ Dewan Pers bersama konstituen melakukan pertemuan dalam rangka konsolidasi dalam menghadapi banyaknya gerakan UKW palsu pada Selasa (6-9-2022) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers. Konstituen yang akan dilibatkan antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-XIX/2021, bahwa Dewan Pers adalah lembaga independen satu-satunya di Indo-

nesia yang secara sah -- menurut Undang-Undang nomor 40/1999 tentang Pers -- sebagai pemegang amanah kemerdekaan pers di Indonesia. Topik itu mengemuka dalam acara syukuran konstituen Dewan Pers yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers secara hibrid, Selasa (6/9) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri seluruh perwakilan konstituen, para ahli pers, dan kuasa hukum yang terlibat dalam persidangan di MK.

Almarhum Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, dalam sambutannya mengatakan, hasil putusan MK adalah kemenangan masyarakat pers secara keseluruhan dan kemenangan kemerdekaan pers itu sendiri. "Ini adalah satu dari sedikit putusan MK yang dimenangkan oleh

masyarakat," kata Prof Azra yang menilai putusan ini adalah sebuah tonggak penting. ●

### Dewan Pers Siapkan Aplikasi Pengaduan

JAKARTA--Dewan Pers akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khusus terkait pengaduan masyarakat terhadap pelbagai masalah pemberitaan,

Dewan Pers akan segera meluncurkan aplikasi pengaduan.

"Ini upaya kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang akan mengadu ke Dewan Pers," kata Yadi Hendriana, ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Selasa (6/9) di Jakarta.

Menurut Yadi, selama ini Dewan Pers telah menyediakan layanan bagi masyarakat yang mengadukan masalah pemberitaan dan pers, mulai dari surat menyurat secara langsung dan secara daring. Meski begitu, upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat ini akan terus dilakukan dan tidak akan berhenti, termasuk dengan menyiapkan aplikasi. Begitu pula penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. ●

*Imam Suwandi*



▲ Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana. (FOTO: DEWAN PERS)





**DEWAN PERS MENERIMA AUDIENSI** dari Pemerintah Kabupaten Garut pada Selasa (27/9/2022) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)







**DEWAN PERS** menggelar uji publik draf Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman pada Selasa (27/9/2022) di Jakarta. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





## GALERI



**DEWAN PERS** menggelar kegiatan Penyegaran Pelatihan Ahli Dewan Pers 2022 pada Rabu (31-9-2022) di Kabupaten Badung, Bali. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)







**DEWAN PERS** menggelar rapat konsinyering membahas pedoman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dewan Pers pada Rabu (7-9-2022) di Bekasi, Jawa Barat.. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)







**DEWAN PERS** melakukan sosialisasi hasil Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 pada Kamis (22-9-2022).  
(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)







**DEWAN PERS** menggelar sosialisasi pengaduan pada Jumat (30-9-2022) di Batam, Kepulauan Riau. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)

